

**BENTUK PEMERINTAHAN DALAM PEMIKIRAN
MUAMMAR QADHAFI DAN IMAM KHOMAENI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

HASIM ASRONI
07360051

PEMBIMBING:

- 1. Drs. H. FUAD, M.A.**
- 2. RO'FAH. M. A., Ph.D.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Pemerintahan sering kali diartikan oleh sebagian masyarakat bahkan tidak jarang mengidentikkan negara dengan pemerintahan atau sebaliknya, akan tetapi secara teoritis tidaklah sama antara negara dan pemerintahan. Oleh beberapa kalangan bahwa negara bersifat tetap, dibanding dengan pemerintahan yang sering kali diubah-ubah. Sehingga dari anggapan itu, bentuk negara tidak sama dengan bentuk pemerintahan.

Muammar Qadhafi menyatakan tentang konsep *syura*, atau musyawarah telah menempati posisi istimewa dalam setiap sistem atau ideologi Islam, Muammar Qadhafi menambahkan sistem perwakilan pemerintahan tidak lain adalah kekuasaan diktatorial sekelompok minoritas terhadap mayoritas atau sebaliknya. Muammar Qadhafi mengharapkan bahwa baik kekuasaan legislatif maupun kekuasaan eksekutif di semua tingkatan akhirnya akan berada di tangan seluruh rakyat. Bagi Imam Khomeini menerapkan *wilayatul al-Faqih* merupakan sistem pemerintahan yang tepat untuk negara Iran yang mana dalam memahami sistem pemerintahan *wilayat al-Faqih*, kaum ulama (Faqih) menduduki posisi. Baik sebagai pengawal, penafsir, maupun pelaksana hukum-hukum Tuhan. Sedangkan kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang) sepenuhnya menjadi hak Tuhan.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian bentuk pemerintahan adalah pendekatan historis yang menitik beratkan pada akar pemikiran kedua tokoh tentang bentuk pemerintahan menurut Muammar Qadhafi dan Imam Khomeini. Perbedaan pemikiran tentang bentuk pemerintahan diantaranya, yakni; karakter pemerintahan kedua tokoh

Kesimpulan dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa dalam bentuk pemerintahan muammar Qhadafi, menekankan rakyatlah yang berhak menjalankan pemerintahan secara langsung, Sedangkan Imam Khomeini, pemerintahan harus dijalankan oleh seorang ulama dengan menekankan nilai-nilai esensial ajaran Islam. Tentunya dalam pemikiran keduanya memiliki kelemahan-kelemahan yang terbantahkan oleh ruang dan waktu.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Hasim Asroni
Lamp : 4 (eksemplar) skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Hasim Asroni

NIM : **07360051**

Judul : SISTEM PEMERINTAHAN DALAM PEMIKIRAN MUAMMAR
QHADAFI DAN IMAM KHOEMEINI

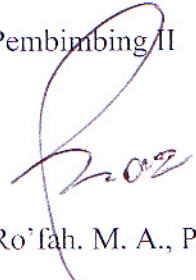
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Sya'ban 1435H
30 Juni 2012 M

Pembimbing II


Ro'fah. M. A., Ph.D



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Hasim Asroni

Lamp : 4 (eksemplar) skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Hasim Asroni

NIM : **07360051**

Judul : SISTEM PEMERINTAHAN DALAM PEMIKIRAN MUAMMAR QHADAFI DAN IMAM KHOEMEINI

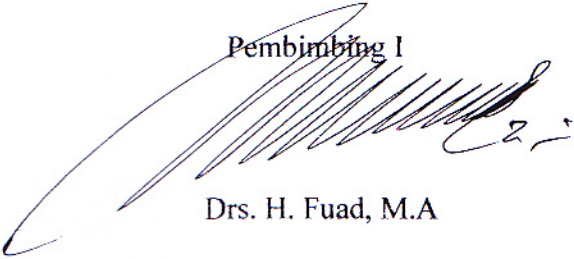
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Sya'ban 1435H
30 Juni 2012 M

Pembimbing I


Drs. H. Fuad, M.A

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

No. UIN.2/K PMH.SKR/PP.00.9/12/2010

Skripsi/Tugas Akhir Dengan Judul : **Bentuk Pemerintahan Dalam Pemikiran
Muammar Qhadafi Dan Imam Khomaeni**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Hasim Asroni

NIM : 07360051

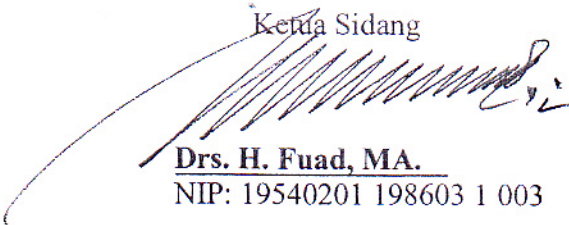
Telah dimunaqasyahkan : Tanggal 19 Juli 2012

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

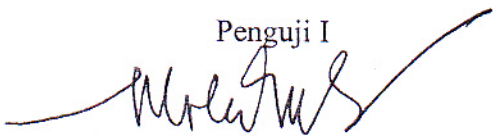
TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang


Drs. H. Fuad, MA.

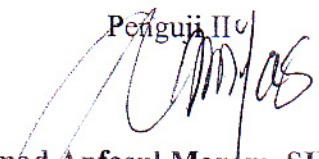
NIP: 19540201 198603 1 003

Penguji I


Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.

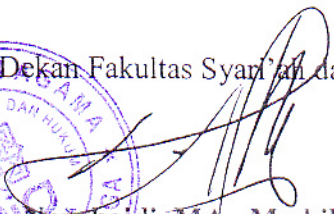
NIP: 19700816 199703 1002

Penguji II


Ahmad Anfasul Marom, SHI., MA.

NIP: 19811107 200912 1 002

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum


Noorhaidi, MA., M.phil., Ph.D.

NIP: 1971120 7/19950 2 1002



MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ
إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah: mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-Nya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan Hanya kepada Allah mereka bertawakkal. (Al-Anfal 8 : 2)

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaannya (Ar-Rad 13: 11)

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يَحَاسِبْكُمْ
بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Al-Baqorah 2: 284)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(Al-Baqorah 2 : 286)

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada:

Kepada Bapak dan Ibu saya, Sukamdi dan Kamsinah, kakak-kakak saya, Abdul Rahman dan Kasiasih serta adik-adik saya; Masrukan, Moh Rifan, dan Moh. Ridlwan yang senantiasa memberikan spirit Do'a untuk saya. Teman-teman dari PMH '07 yang selalu berbagi dalam suka dan duka. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين . أما بعد.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang **“Bentuk Pemerintahan Dalam Pemikiran Muammar Qhadafi Dan Imam Khomaeni ”**. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Noorhaidi., MA, M.Phil selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. H. Fuad, M.A. dan Ibu Ro'fah M.A., Ph.D selaku pembimbing I dan pembimbing II, Segenap Bapak/Ibu tata usaha (TU) Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, juga tidak lupa para pegawai perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak dan Ibu saya, Sukamdi dan Kamsinah, kakak-kakak saya, Abdul Rahman, Kasiasih, serta adik-adik saya, Masrukan, Moh Rifan, dan Moh. Ridlwan yang senantiasa memberikan spirit untuk saya.
5. Teman-teman dari PMH '07 yang selalu berbagi dalam suka dan duka.
6. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT. dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya. *Jazakumullah khairul jaza, Aamiin.*

Yogyakarta, 10 Sya'ban 1435H
30 Juni 2012 M

Yang Menyatakan

Hasim Asroni
07360051

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bāʾ	b	be
ت	Tāʾ	t	te
ث	Ṣāʾ	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥāʾ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khāʾ	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rāʾ	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwū	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yā'	y	-

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متّعدّدة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang '*al*' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyyā'</i>
----------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	<i>A</i>
		ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	kasrah	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>zūkira</i>
يذهب	dammah	ditulis	<i>u</i>
		ditulis	<i>yaẓhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>

4.	dammah + wawu mati	ditulis	ũ
	فروض	ditulis	<i>fur ũḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawr al-furūḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING I.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING II.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II. SEPUTAR SISTEM PEMERINTAHAN DALAM ISLAM.....19

A. Sejarah Pembentukan Pemerintahan.....	19
B. Pengertian Sistem Pemerintahan.....	23
C. Bentuk Pemerintahan	26
D. Karakter Pemerintahan.....	30

BAB III. PEMIKIRAN POLITIK MUAMMAR QADHAFI DAN IMAM

KHOMAENI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM.....40

A. Pemikiran Muammar Qadhafi.....	40
1. Peran politik Muammar Qadhafi di Libya.....	43
2. Pemikiran Muammar Qhadafi tentang bentuk dan karakter pemerintahan ...	44
B. Pemikiran Imam Khomaeni.....	46
1. Peran politik Imam Khomaeni di Iran.....	50
2. Pemikiran Imam Khomaeni tentang bentuk dan karakter pemerintahan.....	51

**BAB IV. ANALISIS BENTUK DAN KARAKTER PEMERINTAHAN MENURUT
MUAMMAR QADHAFI DAN IMAM KHOMAENI.....58**

A. Dari Segi Bentuk Pemerintahan	58
B. Dari Segi karakter Pemerintahan.....	67

BAB V. PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
TERJEMAHAN.....	I
CURRICULUM VITAE.....	II

BAB I

PENDAHULUAN

A . Latar Belakang

Islam lewat sumber al-Qur'an dan as-Sunnah mengandung prinsip umum tentang nilai-nilai yang harus menjadi pedoman bagi umat Islam dalam mengaktualisasikan perilaku dalam kehidupan masyarakat. Namun harus diakui bahwa umat Islam sendiri masih menghadapi kendala dalam merumuskan konsep yang sistematis dalam kehidupan sosial, terutama yang berkaitan dalam bidang politik dan kemasyarakatan. Secara teologis, Islam merupakan sistem nilai dan ajaran yang bersifat transenden, tetapi dari sudut sosiologis, Islam merupakan fenomena peradaban kultural dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Dengan demikian Islam mengandung doktrin ajaran yang universal , yang pada tingkat sosial selalu dituntut perubahan. Menurut ajaran Islam, perubahan disebut *sunatullah* yang merupakan salah satu sifat asasi manusia. Sepanjang perjalanan Islam adalah agama yang bersifat transenden yang telah membantu dalam memahami realitas perkembangan dunia.¹

Al-Qur'an secara tekstual tidak menetapkan negara dan cara bernegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan

¹ Azumardi Azra, *Pergolakan Pemikiran Politik Islam dari Fundamentalisme Modernism Hingga Postmodernisme*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1985), hlm.16

diungkapkan oleh al-Qur'an, bahkan nama sistem pemerintahan pun disebutkan. Dari ide dasar itulah *fiqih siyasah* dikembangkan menjadi sebuah bidang pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara atau hukum tata Negara.²

Al-Qur'an dan as-Sunnah, sebagai sumber hukum Islam tidak memberikan penjelasan secara tegas mengenai sistem pemerintahan, konsep kekuasaan dan ide-ide tentang konstitusi. Selain itu, Nabi Muhammad tidak memberikan konsep pemerintahan yang baku. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Oleh karena itu dalam perjalanan sejarah, bentuk pemerintahan sejak zaman Nabi Muhammad, sampai sekarang bahkan pada masa mendatang akan berkembang sesuai zaman.³

Dengan keragaman latar belakang dan perbedaan dalam menafsirkan teks al-Qur'an maupun as-Sunnah menyebabkan konsep-konsep umum tentang kehidupan politik juga beragam. Konsep suatu pemerintahan misalnya tidak selalu sama antara kalangan Islam sendiri, ada pihak Islam yang justru mendukung sepenuhnya sistem pemerintahan yang bersifat demokratis dan menentang keras usaha-usaha yang menghendaki agar pemerintahan terlibat dalam mengurus kehidupan keagamaan. Sebaliknya, ada juga kalangan Islam yang dengan gigih tetap memperjuangkan agar negara dan pemerintahan dapat menerapkan konsep pemerintahan yang diatur oleh

² Beni Ahmad Saebani *Fiqih Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, cet. ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm.18

³ Harun Nasution dan Azumardi Azra, *Perkembangan Modern Dalam Islam* (Jakarta, yayasan obor, 1985), hlm. 10

syariat Islam, bahkan tidak hanya memperjuangkan syariat Islam, ada kalangan yang justru memperjuangkan agar tegaknya *khilafah Islamiyah*.⁴

Suatu pemerintahan seharusnya memberikan rasa keamanan, keadilan dan kesejahteraan. Meski demikian konsep pemerintahan Islam yang diklaim sebagai representasi dari orang-orang terpilih yang dibaiat oleh rakyat mungkin akan menarik untuk didiskusikan, manakala terjadi fakta bahwa pemimpin yang dibaiat oleh rakyat bersifat cenderung otoriter. Akan tetapi, harus segera disadari bahwa sistem itu dalam kenyataannya telah kehilangan pengaruhnya tidak saja di dunia secara umum, bahkan di dunia Islam itu sendiri.

Banyak ahli politik beranggapan bahwa sistem politik Islam tidak demokratis, anti-pluralisme. Menurut anggapan ini, mekanisme suksesi kekuasaan dalam sistem politik Islam tidak melibatkan masa dan hanya berada dalam lingkaran mereka yang berkuasa dan bersifat terbatas. Misalnya sistem kesultanan, kerajaan, atau dinasti-dinasti Islam yang sudah pernah ada dalam sejarah pemerintahan Islam, umumnya dikenal sangat tidak demokratis, pimpinan yang akan datang ditentukan oleh pimpinan yang sedang berkuasa saat ini, minimal yang akan memimpin kelak adalah keluarga karib, kerabat sang penguasa, mereka mewariskan kekuasaan kepada keluarganya.⁵

⁴ Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 21

⁵ *Ibid.*, hlm.8.

Pemerintahan sering kali diartikan oleh sebagian masyarakat bahkan tidak jarang mengidentikkan negara dengan pemerintahan atau sebaliknya, akan tetapi secara teoritis tidaklah sama antara negara dan pemerintahan. Oleh beberapa kalangan bahwa negara bersifat tetap, dibanding dengan pemerintahan yang sering kali diubah-ubah.⁶ Sehingga dari anggapan itu bahwa bentuk negara tidak sama dengan bentuk pemerintahan.

Dari berbagai teori tentang konsep pemerintahan Islam dalam kajian fiqh politik, akan diteliti pemikiran dari pemimpin yang sangat berpengaruh terhadap peradaban serta pemikir intelektual Muslim. Yaitu Muammar Qadhafi dan Imam Khomaeni yang akan lebih menekankan kepada konsep pemerintahan Islam yang mereka terapkan di negara Islam khususnya di Libya dan Iran.

Muammar Qadhafi menyatakan tentang konsep *syura*, atau musyawarah telah menempati posisi istimewa dalam setiap sistem atau ideologi Islam. Bagi beberapa Muslim, *syura* berarti sebuah majelis permusyawaratan sebagai penasihat penguasa yang tidak sewenang-wenang. Sebagian Muslim lain, *syura* berarti majelis kehakiman yang berkuasa atas masyarakat tradisional Islam secara langsung diatur oleh syariah. Hanya Qadhafi yang mengartikan al-Qur'an seperti ini secara serius, mengkaji secara harfiah, dan menerapkan kepada seluruh anggota masyarakat.

⁶ Cheppy Hericahyono, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986), hlm. 73

Muammar Qadhafi menambahkan sistem perwakilan pemerintahan tidak lain adalah kekuasaan diktatorial sekelompok minoritas terhadap mayoritas atau sebaliknya. Pemilihan wakil rakyat secara bebas dapat menghasilkan sistem pemerintahan yang terbaik. Di sisi lain, Muammar Qadhafi masih menyebut demokrasi perwakilan sebagai ‘ demokrasi yang salah’ dengan begitu ‘filosofinya tertolak’.⁷ Lebih lanjut lagi Muammar Qadhafi menyatakan dengan penuh keyakinan: “kongres rakyat hanya satu-satunya cara untuk mencapai demokrasi kerakyatan. Semua bentuk pemerintahan yang berlaku di dunia saat ini tidak demokratis sampai mereka beralih pada sistem ini. Kongres rakyat merupakan akhir perjalanan panjang pencarian rakyat terhadap demokrasi.”⁸

Pada akhirnya Muammar Qadhafi mengharapkan bahwa baik kekuasaan legislatif maupun kekuasaan eksekutif di semua tingkatan akhirnya akan berada di tangan seluruh rakyat. “ Definisi demokrasi atau konsep pemerintahan yang usang, yang menganggap bahwa demokrasi adalah pengawasan rakyat terhadap pemerintahan, akan digantikan oleh definisi yang benar, yaitu demokrasi adalah pengawasan terhadap diri sendiri.

Di lain pihak Imam Khomaeni adalah seorang tokoh yang memiliki pemikiran yang khas dalam menanggapi segala bentuk permasalahan politik Islam. Salah satu karya terbaik Imam Khomaeni adalah buku” *Pemerintahan Islam*” yang dijadikan

⁷ Muhammad Ayyoub, *Islam dan Teori Dunia Ketiga: Pemikiran Keagamaan Muammar Qadhafi*, (Bogor: Humaniora Press, 1991), hlm. 45

⁸ *Ibid.*, hlm. 65

sebagai seri perkuliahan yang diberikan oleh Imam Khomaeni di kota Najaf. Dalam buku ini ruang lingkup pembahasannya lebih sempit dan spesifik serta disesuaikan dengan yang hadir di kuliah Imam Khomaeni, yaitu para pelajar ilmu-ilmu agama, yang diharapkan akan memiliki peran yang berpengaruh di dalam masyarakat Islam.⁹

Seiring dengan hal itu, hal yang menarik untuk dikaji dari pandangan Imam Khomaeni yang berbeda dari pemikir-pemikir politik Islam sebelumnya. Imam Khomaeni muncul ketika hampir semua negara di dunia menganut pola-pola dari Barat, Khomaeni justru menolak dan menentang dominasi Barat yang dianggap sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Dia juga menampilkan aliran yang diyakini yaitu *Syi'ah imamiyyah isna'asyariyah*. Imam Khomaeni mengungkapkan kewenangan faqih dalam otoritas politis (*wilayah al-faqih*), yang memegang otoritas imam, selama ghaibnya imam. Hal tersebut menjadikan Imam Khomaeni mengikutsertakan ulama sebagai salah satu unsur penting di dalam pemerintahan Islam Iran.

Lebih lanjut Imam Khomaeni banyak berbicara tentang negara Islam. Negara menurut Imam Khomaeni adalah instrumen bagi pelaksanaan undang-undang Tuhan di muka bumi. Tidak seperti dalam Negara demokrasi (murni), pada dasarnya tidak ada hak Negara atau legislatif, sebagai wakil rakyat untuk membuat undang-undang. Ketika memberi rakyat hak untuk membuat undang-undang selain bertentangan

⁹ Ayatullah Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, Trj, Muhammad Anis Maulachela (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), hlm. 7

dengan ajaran Islam, juga hanya akan memaksa negara untuk menerima perundang-undangan yang boleh jadi buruk tetapi merupakan kemauan rakyat, ataupun menolak perundang-undangan yang baik hanya karena bertentangan dengan kehendak rakyat, sedangkan pada dasarnya otoritas membuat undang-undang dan kedaulatan hanya di tangan Allah.

Imam Khomaeni menegaskan lagi bahwa kelompok elite ahli (*wali* atau *authority*), yang paling mengetahui dan oleh karena itu, berhak menafsirkan hukum-hukum Tuhan. Seluruh bagian struktur politik Negara harus dibawahkan kepada *wali* ini. Keadaan inilah yang disebut sistem wilayah al-faqih. Selebihnya jabatan-jabatan dalam struktur Negara diserahkan kepada para ahlinya, baik dia ulama maupun bukan. Meskipun demikian, kualifikasi berupa fuqaha masih juga perlu dipertimbangkan bagi para pejabat pemerintahan karena semuanya bergantung pada seberapa penting dan menentukan bagi kemaslahatan rakyat.¹⁰

Menyimak dan menyikapi tentang konsep pemikiran perpolitikan dalam sistem pemerintahan Muammar Qadhafi dan Imam Khomaeni ditambah lagi dengan kenyataan bahwa pengaruh kedua orang tersebut sangat besar terhadap dunia pemikiran dan peradaban Islam, penulis lalu mencoba melakukan penelitian dan pembahasan secara ilmiah, obyektif, dan kritis terhadap pemikiran kedua tokoh tersebut sebagai kajian dalam skripsi ini.

¹⁰ Ayatullah Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam...*, hlm. 7

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang penyusun kemukakan di atas, muncul pokok masalah yang menjadi kajian khusus dalam skripsi ini adalah:

1. Apa yang melatar belakangi bentuk dan karakter pemerintahan dalam pemikiran Muammar Qadhafi dan Imam Khomaeni?
2. Apa signifikansi pemikiran Muammar Qadhafi dan Imam Khomaeni tentang pemerintahan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bentuk dan karakter pemerintahan dalam pemikiran Muammar Qadhafi dan Imam Khomaeni.
2. Untuk membandingkan pemikiran Muammar Qadhafi dan Imam Khomaeni tentang bentuk pemerintahan karena dicari signifikansi pemikirannya.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat memperluas wawasan tentang bentuk pemerintahan di kalangan umat Islam.
2. Diharapkan dapat menambah wawasan bagi dunia akademik, tentang bentuk pemerintahan.

D. Telaah Pustaka

Wacana yang berkembang di kalangan masyarakat seputar politik kewarganegaraan, agaknya telah merangsang dan memacu minat cukup besar di kalangan intelektual dan peneliti untuk melakukan kajian analisis yang mendalam terhadap karakteristik dan substansi dari pemikiran tersebut, ada beberapa buku, artikel, jurnal dan laporan penelitian (skripsi) dalam penulisan skripsi ini di antaranya:

Muammar Qadhafi, *The green book* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Zakiyuddin Baidhawwy, dengan judul *menapak jalan revolusi* yang diterbitkan oleh INSIS press dan bekerjasama dengan Penerbit Pustaka pelajar tahun 2000¹¹. Di dalam buku tersebut Muammar Qhadafi menerangkan keberadaan antara poros kapitalis dan poros sosialis, sehingga menjadikan Muammar Qhadafi berada pada “problem” ideologisnya. Muammar Qadhafi menambahkan bahwa sosialisme dalam Islam mampu memberikan solusi dari ketidakteraturan di negara ketiga,

¹¹ Zakiyuddin, Baidhawwy, *Menepak Jalan Revolusi*, (yogyakarta: INSIS, 2003), hlm. 17

khususnya di Libya. Pada buku tersebut tidak dijelaskan secara menyeluruh tentang ide demokrasi langsung dari Muammar Qadhafi.

Ending Mintarja memaparkan dengan bahasa sederhana tentang demokrasi langsung dari Muammar Qadhafi di dalam buku yang berjudul “ *Politik Berbasis Agama: Perlawanan Muammad Qadhafi Terhadap Kapitalisme*” yang diterbitkan oleh Pustaka Pelajar, 2004¹².

Buku tersebut menjelaskan tentang sejarah Libya, biografi Muammar Qadhafi yang berpengaruh untuk melawan kolonialisme dan ketidakadilan hukum dari penguasa saat itu (Libya) terhadap masyarakat setempat. Ending Mintarja juga mengkritik hegemoni kekuasaan Muammar Qadhafi, pada bab IV dari buku tersebut, dijelaskan tentang ide demokrasi dari Muammar Qadhafi. Akan tetapi dalam buku tersebut tidak membahas pengaruh langsung ide demokrasi Muammar Qadhafi pada Negara Libya.¹³

Buku yang memberikan penjelasan tentang konsep pemikiran fiqih politik pemerintahan Islam, yaitu buku yang berjudul “ *Islam Dan Teori Ketiga: Pemikiran Keagamaan Muammar Qadhafi*” Muhammad Ayyoub, yang diterjemahkan oleh Wahdad Qurdi dan Abdullah Haq menerangkan tentang pemikiran keagamaan Muammar Qadhafi, teori politik, ekonomi dan sosial. Ulasan buku ini juga

¹² Ending Mintarja, *Politik Berbasis Agama: Perlawanan Muammad Qadhafi Terhadap Kapitalisme*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)

¹³ *Ibid.*, hlm. 34

mempelajari pemikiran, cita-cita dan visi sosial dari segi kepercayaan tersebut. Selain itu buku tersebut menunjukkan biografi dan ide demokrasi Muammar Qadhafi.¹⁴

Imam Khomaeni yang membahas sistem pemerintahan Islam adalah buku yang berjudul “*Islamic Government*”, (alih bahasa oleh Muhammad Anis Maulchela dengan judul, “*Sistem Pemerintahan Islam*” yang diterbitkan oleh pustaka Zahra)¹⁵. Dalam buku ini dijelaskan secara rinci bagaimana Imam Khomaeni merancang bagaimana pentingnya kebutuhan dalam pemerintahan Islam. Bentuk-bentuk pemerintahan Islam yang dicanangkan, disajikan dengan sistematis, begitu pula pembahasan *Wilayah al-Faqih* dengan sejarah keberadaan masa Nabi Muhammad . Tulisan yang cukup menarik dikaji yang ditulis oleh Ahmad Mousawi berjudul “*Teori Wilayah al-Faqih: Asal Mula Dari Penampilanya Dalam Literatur Hukum Syi’ah*”¹⁶. Seperti pada tema tulisan Ahmad Mousawi mencoba menelusuri jejak historis lahirnya gagasan wilayah al-faqih dan pemberlakuan dalam mazhab Syi’ah

Hamid Enayah, berjudul “*Reaksi Politik Sunni Dan Syi’ah*”.¹⁷ Buku ini secara spesifik mencoba melakukan studi perbandingan tentang pemikiran politik antara

¹⁴ Muhammad ayyoub, *Islam Dan Teori Dunia Ketiga: Pemikiran Keagamaan Muammar Qadhafi*, (Bogor : Humaniora press, 2004),

¹⁵ Muhammad Anis Maulchela, 2002, *Sistem Pemerintahan Islam*, Jakarta: Pustaka Zahra,

¹⁶ Ahmad Mousawi, dalam Mumtaz Ahmad, *Masalah- Masalah Teori Politik Islam*, terj. Ena hadi, (Bandung:Mizan, 1993), hlm. 133

¹⁷ Hamid Enayat, *Reaksi Politik Sunni-Syi’ah*, terj. Asep Hikmah (Bandung: Pustaka, 1998), hlm 7

Sunni dan Syi'ah. Kendatipun tidak secara khusus membahas *Wilayah al-Faqih*, namun buku ini relative detail dalam memaparkan pemikiran politik dan hukum ketatanegaraan Syi'ah moderen.

Buku yang ditulis oleh Jonh L. Esposito dan John O, voll, berjudul: "*Demokrasi di Negara -Negara Muslim*"¹⁸. Buku ini disamping membahas perkembangan demokrasi di negara-negara Muslim seperti Pakistan, Al-jazair, Sudan, Malaysia juga membahas demokrasi di Iran. Pembahasan demokrasi Iran mau tidak mau telah bersentuhan dengan *Wilayah al-Faqih*.

Skripsi yang mengangkat tokoh Imam Khomaeni saja tentang politik Islam "*Tinjauan Hubungan Islam dan Politik Dan Gagasan Wilayah al-Faqih*", yang ditulis oleh Tafsirun Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, 2000¹⁹ Skripsi lainnya, yaitu "*Pemerintahan Islam Menurut Pandangan Ayatollah Imam Khomaeni*" karya Ali Wahyudi. Dalam pembahasan yang lebih spesifik Ali Wahyudi memetakan pandangan Imam Khomaeni tentang pemikiran politik kontemporer. Serta skripsi dengan tema demokrasi yang dipaparkan oleh Muammar Qadhafi secara umum yang mengerucut relevansi konsep demokrasi tersebut diterapkan di

¹⁸ Jonh L. Esposito dan John O, voll : *Demokrasi di Negara -Negara Muslim*, terj. Rahmani Astuti, (Bandung: Mizan, t.t.)

¹⁹ Tafsirun, Konsepsi Ayatollah Imam Khomeini Tentang Politik Islam (Tinjauan hubungan Islam dan politik dan gagasan wilayah faqih), Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, 2000

Makalah yang tulis oleh M. Riza Sihbudi berjudul: “Tinjauan Teoritis dan Praktis Atas Konsep Wilayah Al-Faqih”. Makalah ini cukup istimewa karena dalam penulisannya menghadirkan sebuah pemikiran yang bukan hanya teoritis dari gagasan *Wilayah al-Faqih*, melainkan dari sisi praktisnya. Meskipun *Wilayah al-Faqih* telah banyak dibahas dan dikaji oleh intelektual dan peneliti, namun itu bukan berarti telah tertutup kemungkinan bagi peneliti untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan terbaru. Konsep *Wilayah al-Faqih* memiliki relevansi dengan sistem pemerintahan modern, khususnya dengan demokrasi. Sepanjang pengamatan penyusun, belum ada kajian yang membandingkan pemikiran Muammar Qadhafi dan Imam Khomaeni mengenai sistem pemerintahan Islam.

.E. Kerangka Teoretik

Persoalan agama dan politik dalam diskursus filsafat politik Islam hingga saat ini masih menjadi polemik. Walaupun sebenarnya ada semacam keyakinan bersama di antara para pemikir Muslim bahwa Islam sebagai ajaran yang sempurna mesti meliputi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia tidak terkecuali masalah politik.²⁰

Pada masa kontemporer, para teoritis politik Islam merumuskan beberapa teori tentang negara . Teori tersebut secara garis besar dibedakan menjadi tiga paradigma, paradigma integralistik (*unified paradigm*). Dalam paradigma ini agama

²⁰ Widyastini, *Unsur Filsafah Islam*, (Yogyakarta: Kota Kembang, 1991), hlm 18

dan negara menyatu. Wilayah agama meliputi politik atau negara . Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus.

Paradigma simbiotik (*symbiotic paradigm*), dalam pemahaman paradigm ini agama berhubungan secara simbiotik, yaitu suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan negara , karena dengan negara agama dapat berkembang. Sebaliknya negara memerlukan agama, karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam etika moral dan spiritual. Paradigm *sekuleristik*, yaitu paradigma yang menolak pemikiran di atas. Sebagai gantinya, paradigma *sekuleristik* mengajukan pemisahan antara agama atas negara , dan negara atas agama. Konsep *ad-dunya al-akhirah*, *ad-din ad-daulah*, atau *umur ad-dunya umur ad-din* dikotomi secara diametral. Dalam konteks Islam paradigma ini menolak pendasaran negara Islam atau paling tidak, menolak determinasi Islam dalam bentuk tertentu dari Negara.²¹

Sejauh menyangkut sistem politik dan model pemerintahan, Syi'ah seringkali dikritik karena dianggap tidak demokratis. Kritik semacam ini memang dapat dimaklumi, karena sebagaimana diketahui, secara historis sistem pemerintahan Syi'ah mengacu pada sistem *imamah*, yaitu suatu doktrin politik yang menyebutkan bahwa pemerintahan Islam sepeninggal nabi Muhammad adalah mutlak *ahlulbait* (keluarga

²¹ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara , Kritik Atas Politik Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm 26-28

nabi Muhammad) yakni Ali bin Abi Thalib dan sebelas keturunannya.²² Hal ini dianggap oleh banyak pengamat dianggap tidak memberikan peluang bagi pihak lain untuk mendapat hak yang sama, yaitu hak untuk dipilih sebagai pemimpin negara .

Setelah mengkaji tentang pendekatan sosio historis, selanjutnya akan lebih difokuskan pembahasan pada permasalahan bentuk Pemerintahan sebagai kerangka awal. Pendekatan historis bertujuan untuk mengetahui akar pemikiran mengenai sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Islam bila dicoba mengkaji dalam ruang lingkup agama (*din*) dan politik (*siyasah*), atau agama dan negara (*daulah*).²³

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun mencoba menguraikan pandangan Muammar Qadhafi dan Imam Khomaeni mengenai sistem pemerintahan. Adapun metode yang digunakan mencakup empat bagian, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menjadikan bahan kepustakaan sebagai

²² Mehdi Muzaffiri, *Kekuasaan Dalam Islam*, terj. Abdurrahman Ahmed, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994), hlm. 40

²³ Muhammad Abid al-Jabari, *Ad-Daulah Wa Tathbiq asy-syari'ah* Beirut: Markaz Dirasah Al-wahadah Al-Arabiyyah, 1996). Edisi terjemahan bahas Indonesia berjudul: *Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah* . alih bahasa Mujiburrahman, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001)

sumber data primer, baik berupa buku-buku, kitab-kitab, artikel-artikel atau karya ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif²⁴, deskriptif komparatif disini adalah memaparkan dan menguraikan pokok permasalahan yang diteliti secara proposional kemudian dibandingkan dengan proses analisis.

3. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian kepustakaan penyusun melacak semua literatur yang memaparkan sistem pemerintahan menurut pandangan Muammar Qadhafi dan Imam Khomaeni

a. Data Primer

Data yang bersifat primer, diambil dari buku atau karya langsung dari kedua tokoh. Buku Muammar Qadhafi yang berjudul *Kitabul Ahkdhar (The Green Book)* dan buku Imam Khomaeni yang berjudul *Islamic Government*.

b. Data Sekunder

Buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan pemikiran Muammar Qadhafi dan Imam Khomaeni tentang sistem pemerintahan.

c. Data Tersier

²⁴Sudarto, *Metode Penelitian Filsafah*, cet. ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 47-59

Kamus besar ilmu pengetahuan, data yang diperoleh dari kamus untuk menjelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan sistem pemerintahan.

4. Pendekatan masalah.

Pendekatan ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan historis dan pendekatan ilmu politik. Pendekatan historis bertujuan untuk mengetahui akar pemikiran kedua tokoh.²⁵ Sedangkan pendekatan ilmu politik bertujuan untuk menemukan sumbangsih pemikiran kedua tokoh tentang sistem pemerintahan Islam. Berdasarkan dua pendekatan ini diusahakan akan menjawab pokok masalah yang disebutkan di atas

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian (skripsi) ini terdiri dari lima Bab dengan sistematika pendahuluan, pembahasan dan penutup. Yang diuraikan dalam bab dan sub-bab:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang fungsinya untuk mengarahkan pembaca kepada substansi pembahasan ini.

²⁵ Pendekatan historis berfungsi untuk mengetahui latar belakang eksternal dan internal tokoh. Latar belakang eksternal meliputi kondisi khusus yang dialami oleh tokoh, baik dari segi sosial, ekonomi, politik, budaya, sastra maupun filsafah. Latar belakang internal meliputi riwayat hidup, pendidikan, pengaruh yang diterima dan relasi tokoh dengan para ilmunan sezaman.

Bab kedua membahas seputar sistem pemerintahan Islam. Pada bab ini memaparkan seputar sejarah sistem pemerintahan dalam Islam dan bentuk negara dalam Islam. Yaitu, dengan mendeskripsikan sistem pemerintahan dan mengeksplorasi. Sehingga dalam ranah pembahasan, pokok masalahnya sudah jelas. Diharapkan membuat nyaman pembaca.

Bab ketiga berisi biografi singkat Muammar Qadhafi dan Imam Khomaeni serta pemikiran keduanya tentang sistem pemerintahan dalam Islam menurut mereka. Dengan cara, mendeskripsikan dan mengeksplorasi biografi serta unsur-unsur yang melatarbelakangi pemikirannya.

Bab keempat merupakan inti pembahasan yaitu analisis pemikiran seputar sistem pemerintahan Islam antara Muammar Qadhafi dan Imam Khomaeni . Pada bab ini dianalisis sejauh mana tingkat perbedaan maupun persamaan keduanya tentang seputar sistem pemerintahan Islam.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan, merupakan jawaban atas permasalahan yang ada. Pada bab ini juga disertakan saran-saran dan rekomendasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis perbandingan antara pemikiran Muamar Qhadafi dan Imam Khomaeni tentang bentuk pemerintahan. Analisis yang digunakan untuk mencari letak persamaan dan perbedaan tentang sistem pemerintahan.

Dari segi bentuk pemerintahan Islam, Muammar Qadhafi menganut republik sosialis, menolak parlemen demokrasi dan partai politik.. Muammar Qadhafi membentuk Kongres Umum Rakyat (*General People's Congress/GPC*) dan melahirkan apa yang ia sebut dengan *people's power*. Negara pun berganti nama menjadi Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya dimana kekuatan utama terletak pada GPC. Sedangkan Imam Khomeini menyimpulkan bahwa bentuk pemerintahan Iran yang tepat adalah Republik Islam Iran (RII) karena Tuhan satu-satunya pembuat undang-undang. Persamaan antara Imam Khomeini dan Muammar Qadhafi dalam bentuk pemerintahan adalah republik, mereka sependapat bahwa sistem republik merupakan sistem yang tepat dalam bentuk pemerintahan di Libya dan Iran.

Dari segi karakter, pemerintahan Islam harus didasarkan pada demokrasi langsung. Dewan perwakilan nasional yang dibentuk baik dengan cara pemilihan distrik pada satu partai atau koalisi (gabungan beberapa partai), itu semua merupakan demokrasi palsu, karena masing-masing anggota yang duduk di parlemen hanya

mewakili partai, bukan rakyat secara keseluruhan. Lebih lanjut lagi Qadhafi menegaskan bahwa Negara dibentuk untuk kesejahteraan rakyat bukan atas golongan atau kelompok tertentu. Bagi Imam Khomeini menerapkan *wilayatul al-Faqih* merupakan sistem pemerintahan yang tepat untuk negara Iran yang mana dalam memahami sistem pemerintahan *wilayat al-Faqih*, disini kaum ulama (para Faqih) menduduki posisi. Baik sebagai pengawal, penafsir, maupun pelaksana hukum-hukum Tuhan. Sedangkan kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang) sepenuhnya menjadi hak Tuhan. Dengan demikian, pemerintahan Islam yang didasarkan pada *wilayat al-Faqih* juga bisa disebut “pemerintahan hukum Tuhan atas manusia”.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih khazanah pemikiran Islam dalam konteks demokrasi, dan apa yang menjadi hasil dari kajian yang penulis angkat, semoga memberikan wacana baru pemahaman sistem pemerintahan Islam untuk semua kalangan, baik akademisi maupun non-akademisi. Penulis menyadari bahwa apa yang telah tersusun di tangan pembaca sekarang ini memang jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak yang tertarik dalam hal ini (yang peneliti teliti), demi perbaikan dan pengembangan tema yang diangkat agar dapat mendekati kesempurnaan. *Wallāhu A'lam bi as-Sawab*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI , *Al-Qur'an*, Bandung: Jumatul Ali, 2005

Fikih/Ushul Fiqh

Abid al-Jabari, Muhammad, *Ad-Daulah Wa Tathbiq asy-syari'ah* Beirut: Markaz Dirasah Al-wahadah Al-Arabiyyah, 1996). Edisi terjemahan bahas Indonesia berjudul: *Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah* . alih bahasa Mujiburrahman, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001

Ala al-Maududi, Abdul, *Khalifah dan Imamah: Evaluasi kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam*, Bandung: Mizan, 2002

-----, *Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam* , terj. Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1993

Ahmad, Mumtaz, *Masalah-masalah teori politik Islam*, terj. Ena hadi, Bandung:Mizan, 1999

Asad, Muhammad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam*, Bandung: Pustaka,2001

Ayyoub, Muhammad, *Islam dan Teori Dunia Ketiga: Pemikiran Keagamaan Muammar Qadhafi*, Bogor: Humaniora Press, 1991

Aziz, Abdul Ghafar, *Islam Politik: Pro Kontra*, terj. M. Thoah Anwat (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993

Aziz, T.M, "Ulama dan Rakyat; Konsepsi kedaulatan dalam wacana politik Syiah kontemporer" dalam jurnal Al-Huda, Vol. 1, No. 2, 2000

Azra, Azumardi, *Pergolakan Pemikiran Politik Islam dari Fundamentalisme Modernism Hingga Postmodernisme*, Jakarta: Yayasan Obor, 1985

Dudung, Abdulrahman, *Sejarah Peradaban Islam Dari Masa Klasik Hingga Modern*, Yogyakarta: Fakultas Adab, 2002

Khomeini, Ayatullah Imam, *Sistem Pemerintahan Islam*, Trj, Muhammad Anis Maulachela, Jakarta: Pustaka Zahra, 2002

Nabhani, Taqiyuddin An-, *Sistem Pemerintahan Islam dan Realitas Doktrin*, Bangil: Al-izzah, 1997.

Maulchela, Muhammad Anis, *Sistem Pemerintahan Islam*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003

Moin, Baqir, “Ayatulla Khomeini: mencari kesempurnaan: Teori dan Realitas” dalam Mumtaz Ahmad, *para perintis zaman baru Islam*, terj. Ena Hadi, Bandung: Mizan, 1996.

Mousawi, Ahmad, *Masalah- Masalah Teori Politik Islam*, terj. Ena hadi, Bandung: Mizan, 1993.

Muzaffiri, Mehdi, *Kekuasaan Dalam Islam*, terj. Abdurrahman Ahmed, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994

Saebani, Beni Ahmad *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008

Shiddieqy, Muhammad Hasbi As-, *Islam dan Politik Bernegara*, Semarang: PT. Pustaka Rizki putra, 2002

Syafii Maarif, Ahmad, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1996

Syafi, Inu Kencana , *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995

Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqih Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999

Qadim Zallum, Abdul, *Sistem Pemerintahan Islam*, Bangil: Al-Izzah, 1997

Tafsirun, *Konsepsi Ayatollah Imam Khomeini Tentang Politik Islam (Tinjauan hubungan Islam dan politik dan gagasan wilayah faqih)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqih Mazhab Negara , Kritik Atas Politik Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: LkiS, 2001

Widyastini, *Unsur Filsafah Islam*, Yogyakarta: Kota Kembang, 1991

Yamani, *antara al- Farabi dan Khomeini : filsafah politik islam*, Bandung: Mizan, 2002

Lain-lain

Baidhawiy, Zakiyuddin, *Menapak Jalan Revolusi*, Yogyakarta: INSIS, 2003

Mintarja, Ending, *Politik Berbasis Agama: Perlawanan Muammad Qadhafi Terhadap Kapitalisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Algar, Hamril dan Rbon w. Carlsen, *Mata air kecemerlangan, sebuah pengantar untuk memahami pemikiran Khomeini*, terj. Zaenal abiding, Bandung: mizan 1991

Budiarjo, Miriam *Dasar-Dasar Ilmu Poltik*, Jakarta: Gramedia pustakan utama, 1996

Enayat, Hamid *Reaksi Politik Sunni-Syi'ah*, terj. Asep Hikmah (Bandung: Pustaka, 1998)

HericaHyono, Cheppy, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986

Jurdi, Syarifuddin, *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

L. Esposito, Jon dan Jon O, voll : *Demokrasi di Negara -Negara Muslim*, terj. Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, t.t.

Mintarja, Ending, *Politik Berbasis Agama: Perlawanan Muammad Qadhafi Terhadap Kapitalisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Mohsen M., *The Making of Iran Islamic Revolution*, London: Westview, 1988

Nasution, Harun dan Azumardi Azra, *Perkembangan Modern Dalam Islam* Jakarta, Yayasan Obor, 1985

Siddiqei, Kalim, dkk, *Gerbang Kebangkitan Revolusi Islam Dan Khomeini Dalam Perbincangan*, terj. Team shalahudin press, Yogyakarta: Shalahudin Press, 1980

Sihbudi, M. Riza, *Dinamika Revolusi Iran, Dari Jaruhnya Syah Hingga Wafat Ayatollah Khomeini*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1989

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997

BAB II		
HAL	FN	Terjemahan
24	11	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul-Nya, dan Ulil Amri di antara kamu.
24	12	Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka.
30	19	Tiadalah kami alpakan sesuatupun dalam al-Kitab.
38	25	Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan.
38	26	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul -Nya, dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnah-Nya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama lengkap : HASIM ASRONI
Nama panggilan : HASIM
Tempat tanggal lahir : Pati, 06 Januari 1986
Alamat lengkap : Kertomulyo, Kec. Trangkil, Kab. Pati
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah

RIWAYAT PENDIDIKAN

- MI Raudhatul Ulum, Guyangan kec. Trangkil, Kab. Pati
- MTs Raudhatul Ulum, Guyangan kec. Trangkil, Kab. Pati
- MA Raudhatul Ulum, Guyangan kec. Trangkil, Kab. Pati

RIWAYAT ORGANISASI

- PMII
- Karang Taruna